

**KMP VERSUS KIH;  
Implikasi Ketatanegaraan Perseteruan Dua Kubu  
Dalam Dimensi Etika Politik\***

**Nur Rohim Yunus<sup>1</sup>**

Permalink: <https://www.academia.edu/15117495>

**Abstract: KMP Versus KIH: Constitutional Implication of the Dispute of Two Parties in Etical and Political Dimension.** Ethics is an important element of social interaction. Good deeds will produce good things and vice versa. However, in politics, it's not always the same. The Dispute between two side "KMP" and "KIP", is started with the dispute between Presidential Candidates. This quarrel affect our constitutional system as the change of system of governor/mayor's election, mechanism on the nomination of heads of Parliament and the other issues promulgated in the Act. This quarrel can be ended if the politicians can put priority on ethics matters, compared to personal and political parties' interests.

**Key Words:** dispute, etics in politics and Constitutional implication

**Abstrak: KMP Versus KIH; Implikasi Ketatanegaraan Perseteruan Dua Kubu Dalam Dimensi Etika Politik.** Persoalan etika merupakan hal yang sangat vital dalam interaksi sosial, karena setiap perbuatan manusia menimbulkan dampak sesuai dengan apa yang dilakukan. Perbuatan yang baik menghasilkan dampak yang baik, begitupun sebaliknya. Meskipun terkadang di lapangan khususnya ranah politik praksis, perbuatan yang baik kerap berdampak buruk dan begitu sebaliknya. Begitu pula hanya perseteruan dua kubu yang terjadi antara kubu Koalisi Merah Putih dan Kubu Indonesia Hebat yang bermula dari perseteruan dua kubu kemenangan calon presiden; Jokowi-Jk dan Prabowo-Hatta. Akibat perseteruan ini berimplikasi ketatanegaraan seperti adanya perubahan sistem pemilihan umum kepala daerah, mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan Pimpinan MPR, dan beberapa produk legislasi lainnya. Perseteruan ini dapat berakhir apabila para praktisi politik di negeri ini mampu mengedepankan etika politik di atas kepentingan pribadi, partai, dan golongan.

**Kata Kunci:** Perseteruan, Etika Politik, Ketatanegaraan

---

\* Diterima tanggal naskah diterima: 27 April 2015, direvisi: 30 April 2015, disetujui untuk terbit: 20 Mei 2015.

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Jln. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel. E-mail: [nurrohimyunus@uinjkt.ac.id](mailto:nurrohimyunus@uinjkt.ac.id).

## **Pendahuluan**

Perhelatan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 merupakan ajang demokrasi yang sangat unik dan luarbiasa. Karena pilpres kali ini hanya diikuti oleh dua pasangan yang sama-sama memiliki kubu pendukung yang kuat, yaitu kubu Prabowo melawan kubu Jokowi yang ditopang oleh Megawati sebagai pengusung utama. Tetapi uniknya, ternyata Prabowo dan Megawati sebelumnya telah mengikat janji bersama untuk saling bahu membahu, dukung mendukung dalam pentas pencapresan. Sebelumnya tahun 2009 Prabowo dengan kekuatan penuhnya mendukung Megawati untuk menjadi Calon Presiden, begitu sebaliknya –diharapkan- Megawati mendukung Prabowo di perhelatan pencapresan di tahun 2014. Ternyata fakta politik berbicara lain, Megawati dengan PDI-Pnya ternyata malah mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden pada tanggal 14 Maret 2014, bukan Prabowo.

Permasalahan muncul kemudian, tak lama setelah Jokowi resmi menjadi capres PDI Perjuangan, beredar dokumen perjanjian Batu Tulis. Perjanjian tertanggal 16 Mei 2009 ini dibuat dengan tanda tangan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2009 di atas materai Rp. 6.000. Politisi Gerindra banyak menyinggung perjanjian ini terkait spekulasi pencapresan Jokowi, sedang disisi lain banyak politisi PDI Perjuangan yang membantah ada klausul bahwa Megawati harus mendukung Prabowo dalam Pilpres 2014.

Perjanjian Batutulis<sup>2</sup> hanya diketahui oleh beberapa orang saja, yaitu hanya lima orang dari Gerindra dan lima orang dari PDI Perjuangan. Di antara satu orang dari Gerindra adalah Hasjim Djojohadikusumo, sedang satu dari lima orang dari PDI Perjuangan adalah almarhum Theo Syafi'i.

---

<sup>2</sup> Batutulis sendiri berasal dari nama daerah di Kota Bogor yang saat ini dijadikan nama jalan, yakni Jalan Batutulis, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Di Jalan Batutulis ini terdapat prasasti yang juga dinamakan sesuai nama daerah tersebut. Prasasti berukir kalimat bahasa dan aksara Sunda Kuno itu berangka tahun 1455 Saka (1533 Masehi). Batu prasasti tersebut adalah peninggalan Kerajaan Sunda. Kerajaan ini diketahui pernah ada antara tahun 1932 dan 1579 di bagian barat pulau Jawa yang meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah sekarang. [Lihat: Latipah Hendarti, *Menepis kabut halimun: rangkaian bunga rampai pengelolaan sumberdaya alam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h.12].

Isi dokumen yang beredar tentang perjanjian Batu Tulis itu adalah sebagai berikut:

Kesepakatan bersama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia 2009-2014

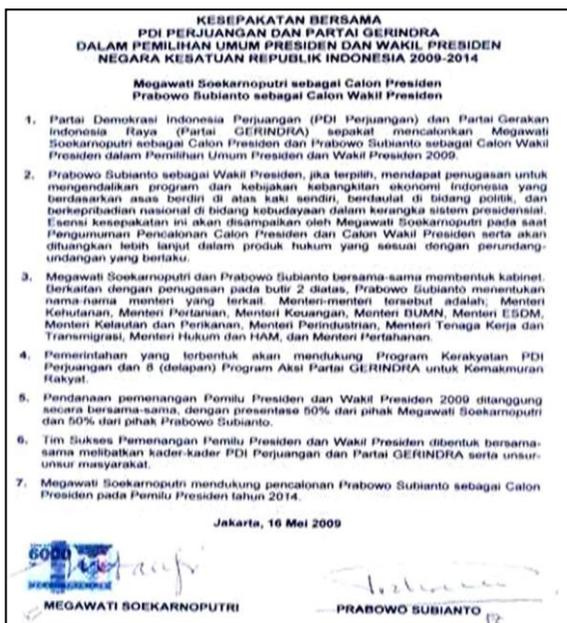
Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden

Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009.
2. Prabowo Subianto sebagai wakil presiden, jika terpilih, mendapat penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdasarkan azas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan kepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial. Esensi kesepakatan ini akan disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri pada saat pengumuman pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden serta akan dituangkan lebih lanjut dalam produk hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk kabinet. Berkaitan dengan penugasan pada butir 2 diatas, Prabowo Subianto menentukan nama-nama menteri yang terkait. Menteri-menteri tersebut adalah Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan.
4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 (delapan) program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat.
5. Pendanaan kemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ditanggung secara bersama-sama dengan presentase 50% dari pihak Megawati Soekarnoputri dan 50% dari pihak Prabowo Subianto.
6. Tim sukses kemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 dibentuk bersama-sama melibatkan kader-kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra serta unsur-unsur masyarakat.
7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014

Point nomor 7 perjanjian Batutulis mengisyaratkan bahwa Megawati Soekarnoputri **mendukung pencalonan** Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada pemilu presiden tahun 2014.

Poin inilah yang menjadi permasalahan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2014. Prabowo<sup>3</sup> mengartikan bahwa dengan perjanjian ini, maka ia akan menjadi calon Presiden dari PDI Perjuangan pada pemilu presiden tahun 2014. Sehingga ketika Megawati malah memberi mandat<sup>4</sup> kepada Jokowi sebagai Calon Presiden dari PDI Perjuangan berarti telah melanggar perjanjian yang ditandatangani di atas materai tersebut.



Gambar 1. Naskah Asli Kesepakatan Batu Tulis

Menurut Prabowo perjanjian itu dibuat karena kesamaan visi yang ada antara Gerindra dan PDIP menyangkut kecocokan dalam pandangan kebangsaan dan nasionalisme, sehingga muncul keinginan

<sup>3</sup> Hal ini terlihat dari statemen prabowo yang mengatakan: "Kalau Anda manusia, lalu ada di pihak saya, bagaimana? Ya pikirkan saja. Saya tidak mengerti apa salah saya. Saya menghormati beliau." Lihat: <http://www.antaranews.com/berita/424334/prabowo-jokowi-capres-pdip-langgar-perjanjian-batu-tulis>

<sup>4</sup>Penggunaan kalimat bahwa Jokowi menerima mandat dari ketua umum PDI-P menunjukkan bahwa Jokowi adalah kepanjangan tangan dari partainya dan bukan dari rakyatnya. Hal ini perlu mendapat kritikan karena Jokowi merupakan pejabat publik yang tidak boleh lagi dikendalikan partai. [Lihat: Binus Media & Publishing, Corporate Communication – Bina Nusantara. [www.binus.ac.id/www.binus.edu](http://www.binus.ac.id/www.binus.edu)].

untuk berjuang bersama.<sup>5</sup> Sedang Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo saat itu mengemukakan, bahwa isi perjanjian Batutulis otomatis gugur dengan sendirinya karena pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto gagal menjadi pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.<sup>6</sup>

Dalam hal ini timbul dua pandangan dalam menanggapi permasalahan ini. Pandangan pertama yang menganggap Megawati telah melanggar etika politik yang seharusnya, dan pandangan kedua yang menganggap kebijakan Megawati menggugurkan dukungan dalam kesepakatan sebagai perilaku yang lumrah dalam kacamata perpolitikan.

Dari permasalahan diatas, timbul beberapa pertanyaan sebagai acuan perbahasan, apakah Megawati benar-benar telah mengingkari perjanjian Batutulis tersebut? Apa batasan dan ketentuan bahwa perbuatan politisi telah melanggar etika politik yang seharusnya? Implikasi apa yang timbul dari perseteruan politik ini?

### **Penafsiran Prabowo Terhadap Perjanjian Batutulis**

Pada dasarnya Prabowo Subianto memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan perjanjian Batutulis tersebut, khususnya dalam poin nomor 7 dengan maksud yang diinginkan oleh Megawati. Prabowo menganggap Megawati telah mengingkari perjanjian yang telah ditandatanganinya itu.<sup>7</sup> Adapun penafsiran Prabowo tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, Prabowo menafsirkan kata 'mendukung pencalonan' berbeda dengan yang dimaksud oleh Megawati. Bagi Prabowo, Megawati 'mendukung pencalonan' nya diartikan sebagai PDI Perjuangan mendukung pencalonan. Jadi, bagi Prabowo, PDI Perjuangan dipersonifikasikan dalam Megawati Soekarnoputri. Pemikiran ini timbul karena Partai Gerindra adalah personifikasi diri Prabowo sendiri, sedang PDI Perjuangan tidak, ia merupakan 'modifikasi' dari PDI zaman

---

<sup>5</sup>Lihat: <http://www.antaraneews.com/berita/424334/prabowo-jokowi-capres-pdip-langgar-perjanjian-batu-tulis>

<sup>6</sup> Tjahjo Kumulo mengatakan: "Seandainya ada perjanjian, itupun otomatis gugur dengan sendirinya karena pasangan capres-cawapres, Ibu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, tidak mencapai kemenangan pada Pilpres 2009" Lihat: <http://www.antaraneews.com/berita/424334/prabowo-jokowi-capres-pdip-langgar-perjanjian-batu-tulis>

<sup>7</sup>Lihat: <http://politik.kompasiana.com/2014/03/17/prabowo-keliru-mengartikan-perjanjian-batutulis-639885.html>

Orde Baru yang diformat ulang oleh jajaran PDI promega pada 1999.<sup>8</sup> Walau pun dominasi Megawati sangat kental dan kentara, tetapi sahamnya tidaklah 100%. Sedangkan saham Partai Gerindra memang 100% dari Prabowo, bahkan merupakan kendaraan politik yang dibuat olehnya.

*Kedua*, Prabowo dalam menterjemahkan ‘mendukung pencalonan’ itu sama dengan mencapreskan dirinya, padahal ‘mendukung pencalonan’ sepanjang tidak ada definisi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada perjanjian itu tidak serta merta berarti mencapreskan, karena boleh jadi bentuk dukungan bisa bermacam-macam, baik hanya sekedar suport, restu maupun dukungan penuh.

*Ketiga*, Prabowo dalam menterjemahkan ‘mendukung pencalonan’ adalah perjanjian yang mengikat tanpa melihat hasil pemilu Presiden 2009. Sedang bagi Megawati, apabila pasangan Mega-Prabowo menang pada 2009 maka perjanjian akan berlaku dan mengikat.

Dari analisis diatas pada dasarnya kedua pihak memiliki logika berpikir yang berbeda, yang tentunya bagi Prabowo perjanjian mengikat kedua belah pihak tanpa batas waktu, sedang bagi Megawati perjanjian menjadi gugur karena alasan kondisi dan keadaan yang telah berubah.

### **Kondisi Politik Yang Menguntungkan PDI Perjuangan**

Kekuatan PDI Perjuangan dalam pentas perpolitikan di tahun 2014 memang sedang menguntungkan, tak heran bila kemudian menjadikan Megawati berani mengajukan capres sendiri dari kader partainya sendiri dibanding dari partai lain. Bila pun kemudian poin tujuh dari kesepakatan Batutulis dianggap sebagai janji yang harus ditepati, maka pengajuan Jokowi sebagai Capres adalah keputusan berani, karena kondisi politik yang sedang menguntungkan dan menempatkannya di papan atas.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Lihat: Hasrullah, *Megawati Dalam Tangkapan Pers*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm: 51-52

<sup>9</sup>Dalam sejarah pemilihan Presiden di negeri ini sudah tiga kali PDIP gagal menempatkan calonnya sebagai Presiden. Sebelum Presiden RI dipilih langsung oleh rakyat, PDIP pernah gagal menempatkan Megawati sebagai Presiden. Melalui sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999, Presiden RI terpilih adalah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari PKB, padahal ketika itu PDIP adalah partai pemenang Pemilu legislatif (DPR). Tahun 2004 PDIP menempatkan Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi Ketua PBNU waktu itu. Pasangan ini melaju hingga putaran kedua berhadapan dengan SBY-JK yang akhirnya kembali menggagalkan Megawati menjadi RI 1. Lalu di tahun 2009 PDIP kembali gagal menempatkan Megawati menjadi Presiden yang kala itu berpasangan dengan Prabowo sebagai Wapres.

Menurut Aries Musnandar<sup>1</sup> PDI Perjuangan berhasil memperoleh keuntungan besar dari dinamika yang terjadi dalam pentas politik praktis di negeri ini selama periode 2009-2014. Paling tidak dapat teridentifikasi 4 hal yang membuat PDI Perjuangan diuntungkan, yaitu:

*Pertama*, sebagai partai besar keputusan PDI Perjuangan tidak bergabung dalam partai koalisi pemerintah dan secara konsisten menjadi partai oposisi merupakan langkah tepat. Selama periode kepemimpinan SBY-Boediono dalam kapasitas sebagai oposisi PDI Perjuangan melakukan kerja-kerja aktif mengkritisi pemerintahan, sehingga menjadi hal yang cukup efektif untuk meningkatkan citra PDI Perjuangan.

*Kedua*, secara bersamaan partai Demokrat mengalami 'tsunami politik' sepanjang pemerintahan SBY- Boediono. Partai Demokrat (PD) dirundung sejumlah kasus mulai dari korupsi hingga ketidakharmonisan elite PD. Persoalan ini telah menurunkan kredibilitas PD dihadapan rakyat, sehingga rakyat merasa muak dan kecewa dengan PD dan partai-partai lain yang bergabung dalam koalisi partai pemerintah. Sementara itu partai non koalisi seperti Gerindra dan Hanura sedikit banyak memperoleh keuntungan dari situasi ini, namun oleh karena mereka masih partai baru dan tidak sebesar PDI Perjuangan, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak terlalu signifikan. Hasilnya, simpati rakyat dialihkan kepada PDI Perjuangan.

*Ketiga*, gaya kepemimpinan "diam itu emas" yang ditampilkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mampu mengangkat elektabilitas partai.<sup>1</sup> Dengan tidak mengobrol janji dan tidak banyak mengumbar kata-kata. Sebaliknya Megawati terus melakukan kerja-kerja konsolidasi ke kantong-kantong dan basis PDI Perjuangan di daerah-daerah. Karut marut di internal partai Demokrat dan ketidakserasian diantara sesama partai koalisi justru memperkuat simpati rakyat pada PDI Perjuangan. Jadi, kepopuleran dan peningkatan elektabilitas PDI Perjuangan di mata rakyat sedikit banyak berasal dari perilaku elit partai koalisi yang mengecewakan publik.

---

Kekalahan yang cukup telak berhadapan dengan pasangan Capres Cawapres SBY-Boediono yang mencapai 60% suara rakyat. [Lihat: Floriberta Aning S, *100 tokoh yang mengubah Indonesia: biografi singkat seratus tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia di abad 20*, (Yogyakarta: Narasi, 2007), hlm: 128-129].

<sup>1</sup> Pengajar dan Peneliti di PTN Malang dalam artikelnya Prediksi<sup>0</sup>Skenario Megawati Tentang Capresnya Jokowi, [www.umm.ac.id](http://www.umm.ac.id) Kamis, 10 April 2014 | 17:25:52 WIB.

<sup>1</sup> Lihat: Upi Tuti Sundari Azmi, *Cinta, ambisi, politisi, dan negarawan: percakapan Upi dan La Rose*, (Jakarta: Yayasan La Rose, 1999), hlm: 34.

Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1459 - 149

*Keempat*, dalam situasi centang perenang kepemimpinan nasional yang didukung koalisi partai, kemudian muncul gaya kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Kepemimpinan Jokowi yang merakyat tidak berjarak, berperilaku "*genuine*", sederhana merupakan antitesa gaya kepemimpinan elite penguasa saat ini yang berjarak dengan rakyat, mengutamakan pencitraan, eksklusif dan besar gengsi sedikit malu. Jokowi dengan gaya kepemimpinan 'lain dari yang lain' itu berhasil merebut hati rakyat dan disukai rakyat. Hasil survei capres menunjukkan hal itu.<sup>1</sup> Namun tingginya elektabilitas Jokowi tidak sertamerta direspon maksimal oleh elite PDI Perjuangan, dikarenakan partai telah bulat-bulat menyerahkan kepada sang Ketua Umum. Selain itu, intensitas yang tinggi dilakukan Megawati dengan kerap membawa Jokowi ikut 'bersafari politik'. Disisi lain seperti biasanya Megawati tetap mempratekkan perilaku 'diam itu emas', sehingga membuat pengamat dan media massa mereka-reka dan menafsirkan sendiri aktivitas Megawati dan Jokowi tersebut. Sejumlah kalangan berpendapat dengan memperhatikan berbagai tanda dan isyarat yang ditampilkan Megawati dalam beberapa waktu sebelum Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk menjadi Capres pilihan PDIP.

2

### **Pro Kontra Pencapresan Jokowi**

Jokowi akhirnya mendapat mandat Megawati untuk maju dalam pemilihan Presiden RI 2014. Para jajaran dan kader PDIP mulai dari yang pemula hingga senior tampak segan, tunduk dan patuh pada sang Ketua Umum, sehingga tidak berani melontarkan ide dan gagasan terkait Capres PDIP ini. Partai yang mengusung kata demokrasi sebagai bagian dari nama partainya ini menyerahkan sepenuhnya penentuan capres PDIP kepada ketua umum Megawati. Ibarat hak prerogatif Presiden RI yang tidak bisa diganggu-gugat PDIP pun memberikan hak eksklusif itu kepada ketua umumnya. Meski publik tadinya menganggap

---

<sup>1</sup> Jokowi capres 2104 paling unggul menurut laporan hasil survei nasional Pusat Data Bersatu (PDB). Hasil survei capres 2104 ini menyebutkan bahwa calon presiden (capres) yang paling potensial dipilih oleh rakyat adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dalam survei yang digelar pada 11-18 Juni 2013, Joko Widodo meraih elektabilitas paling tinggi 29,57%. Setelah Jokowi, kemudian disusul oleh Prabowo Subianto 19,83%, Megawati 13,08%, dan Aburizal Bakrie 11,62%. Ketua PDB Didik J. Rachbini memaparkan kenaikan elektabilitas Jokowi paling tinggi dibandingkan dengan calon-calon lainnya dari periode Januari-Juni 2013. Lihat: <http://www.bisnis.com/survei-capres-2014-jokowi-lagi-lagi-teratas>.

Mega akan maju Capres lagi, namun dugaan itu ternyata tidak tepat. Keputusan Megawati tak jarang mengecoh publik.<sup>1</sup>

Penunjukan Jokowi sebagai capres, menurut Aries Musnandar<sup>1</sup> didahului oleh adanya tiga spekulasi yang dirancang Megawati sebagai skenario pemenangan Pilpres. Skenario pertama, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla. Seperti dugaan banyak orang yakni menetapkan Jokowi sebagai Capres PDIP tetapi memilih Cawapres dari luar PDIP, yakni mantan wapres JK yang relatif dekat dengan PDIP. Komposisi ini merupakan perpaduan serasi antara generasi penerus (Jokowi) dan generasi peralihan (JK).<sup>1</sup>

Skenario kedua, Jokowi bergandengan dengan salah satu dari koalisi partai. Skenario ini Capres tetap dari PDIP, tetapi Cawapres diserahkan kepada hasil kompromi partai-partai lain pendukung PDIP, sehingga diharapkan total suara di parlemen pendukung pasangan ini di atas 50%. Bisa jadi Capres tersebut dari kalangan pimpinan (petinggi) partai atau jika tidak ada kesepakatan, maka dicari jalan tengah yakni tokoh kredibel dan terbukti mampu menjalankan tugas Wapres secara baik, yakni mantan Wapres Jusuf Kalla. Maka kembali pada skenario pertama tadi.

Skenario ketiga, Jokowi bergandengan dengan Ahok. Skenario ini bila terwujud maka akan menjadi pukulan telak sekaligus serangan balik ditujukan pada Partai Gerindra khususnya Capres Prabowo yang menuding elite PDIP mengingkari janji pada perjanjian Batutulis yang sudah ditandatangani oleh Megawati dan Prabowo.

Pada akhirnya Megawati menetapkan Jokowi sebagai capres yang diusung oleh PDIP. Pria yang bernama lengkap Joko Widodo ini

---

<sup>1</sup> Hal ini pun terlihat tidak lama setelah Taufik Kiemas wafat menyebar isu bahwa Ketua MPR akan diisi oleh Pramono Anung petinggi PDIP. Tetapi ternyata sang Ketua Umum menunjuk orang lain diluar dugaan banyak orang karena tidak pernah samasekali diwacanakan oleh elite partai maupun media massa. Megawati menunjuk Sidarto Danusubroto sebagai Ketua MPR, mantan ajudan Presiden Soekarno. Keputusan ini memutarbalikkan opini publik yang berkembang saat itu. Inilah misteri gaya kepemimpinan Megawati.

<sup>1</sup> Pengajar dan Peneliti di PTN Malang dalam artikelnya Prediksi<sup>4</sup>Skenario Megawati Tentang Capresnya Jokowi, [www.umm.ac.id](http://www.umm.ac.id) Kamis, 10 April 2014 | 17:25:52 WIB.

<sup>1</sup> Yang termasuk generasi peralihan menurut Habibie adalah mereka yang pernah bekerjasama dengan generasi angkatan 45, sehingga kira-kira umurnya di atas 60 tahun. Sedangkan generasi penerus (dibawah umur 60 tahun) adalah mereka yang tidak sempat bekerjasama secara langsung dengan generasi 45. Sehingga komposisi ini cukup menarik apabila bisa disandingkan dalam kepemimpinan nasional Indonesia. [Lihat: <http://thegreenblog.net/2014/03/28/kriteria-capres-2014-menurut-bj-habibie-usia-harus-berada-diantara-40-60-tahun/>].

merupakan sosok yang unik, pemimpin yang dikenal merakyat selama menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Pamor Jokowi memang sedang tenar dan naik daun, bahkan ketenarannya mampu mengalahkan Abu Rizal Bakri (ARB) capres yang diusung oleh Partai Golkar dan juga capres Prabowo.

Akan tetapi pencapresan tetap memunculkan sikap pro dan kontra yang meluas, walaupun dalam berbagai survei calon presiden (capres) nama Jokowi selalu berada diatas nama-nama lainnya. Bagi masyarakat yang pro menganggap Indonesia butuh pemimpin seperti Jokowi yang dianggap merakyat, sedang yang kontra menganggap Jokowi harus menyelesaikan tugas dan janjinya sebagai gubernur DKI Jakarta. Sebagai seseorang yang belum satu periode dan belum genap dua tahun memimpin Jakarta, pencalonan Jokowi sebagai Capres memang dapat dirasakan kurang etis.

Kritik untuk Jokowi lebih diarahkan pada janji yang akan memimpin dan mengurus Jakarta sampai masa jabatannya selesai. Termasuk dalam penilaian kinerja Jokowi sebagai gubernur yang belum tergolong istimewa, sebab belum ada prestasi nyata yang ditunjukkan kepada warga negara. Berbagai masalah di Jakarta belum sepenuhnya terselesaikan, seperti banjir dan kemacetan yang hingga saat ini belum jelas arah penanganannya.<sup>1</sup>

Terkait dengan etika politik, seorang pemimpin dapat dinilai tidak beretika manakala dirinya tidak amanah dalam menjalankan tugas dan lebih memilih untuk mementingkan kepentingan partai daripada rakyat. sebuah kepercayaan terhadap pemimpin politik datang dari adanya komitmen pemimpin yang mendapat kepercayaan rakyat, maka dirinya harus mengedepankan dan menepati janjinya kepada rakyat.

### **Etika Politik Kaum Elit**

Perilaku, sikap dan tindak yang dilakukan oleh Megawati dan Jokowi, termasuk Prabowo yang menjadi pihak terzalimi dalam janji politik Batutulis pada hakikatnya tetap harus berpegang pada etika

---

<sup>1</sup> Menurut beberapa pengamat Jokowi akan lebih layat menjadi capres di tahun 2019 setelah dirinya menyelesaikan tugas satu periode menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Untuk menjadi pemimpin nasional yang kuat, berkarakter dan bertanggungjawab maka Jokowi harus diuji terlebih dahulu. Apabila Jokowi berhasil memimpin Jakarta selama satu periode dan memecahkan segala persoalan yang ada maka dirinya dapat dinyatakan sudah sangat layak memimpin Indonesia. [Yusa Djuyandi, *Polemik Pencalonan Jokowi*, <http://suar.okezone.com/read/2014/04/14/58/970057/polemik-pencalonan-jokowi>].  
152 – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

politik yang berlaku. Lalu sudahkan perilaku para elit politik ini sudah sesuai dengan etika politik yang seharusnya?

Filosof Immanuel Kant pernah menyindir, ada dua watak binatang terselip di setiap insan politik; merpati dan ular. Politisi memiliki watak merpati yang lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme. Tetapi, ia juga punya watak ular yang licik dan jahat, serta selalu berupaya memangsa merpati. Celaknya, yang sering menonjol adalah “sisi ular” ketimbang watak “merpati”-nya. Metafora sang filosof yang normatif dan simbolik itu sudah menjadi pengetahuan umum, ketika berbicara soal etika politik. Bahkan ekstimitas watak politisi pun diasosiasikan dengan “watak binatang”.<sup>1</sup>

Etika,<sup>1</sup> atau yang disebut dengan filsafat moral (Telchmar, 1998) mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik dengan demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan sebaliknya.

Ketidajelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya,

---

<sup>1</sup> M Alfian Alfian, “Dari Perbendaharaan Etika Politik”, The Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 8 Juli 2008.

<sup>1</sup> Istilah “etika” pun berasal dari bahasa Yunani kuno yakni *ethos* dalam bentuk tunggal memiliki arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, jika kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka “etika” berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam bahasa Yunani, etika berarti *ethikos* mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar-salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1953) “etika” dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Jika kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti : 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam bahasa Inggris, etika disebut *ethic* (*singular*) yang berarti *a system of moral principles or rules of behaviour*, atau suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Jika *Ethics* yang dimaksud singular berarti suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. Jika *ethics* yang dimaksud plural (jamak) berarti prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi. (Lihat: K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm: 4.

pendidikan, dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa menjadi kabur. Sebuah kekaburan yang disebabkan karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik.

Publik hanya disuguhi hal yang menyenangkan dan bersifat indrawi belaka. Artinya hanya diberi harapan tanpa realisasi. Inilah yang membuat publik terajari agar menerapkan orientasi hidup untuk mencari mudahnya saja. Keadaban bangsa menjadi kehilangan daya untuk memperbaiki dirinya. Etika politik yang berpijak pada Pancasila hancur, karena politik identik dengan kepentingan. Kepentingan politik menjadi acuan kebijakan yang diambil dalam ruang publik.

Di masa reformasi yang serba boleh ini, kemunduran etika politik para *elite* dalam setiap jejak perjalanannya membuat "miris". Kemunduran etika politik para *elite* salah satunya ditandai dengan menonjolnya sikap pragmatisme dalam perilaku politik yang hanya mementingkan kelompoknya saja. Kepentingan bangsa, menurut mereka bisa dibangun hanya melalui kelompoknya. Karena itulah, di samping aturan legal formal berupa konstitusi, politik berikut praktiknya perlu pula dibatasi dengan etika. Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang dijauhi. Sehingga kemudian, sebagai masyarakat yang modern, mengetahui pentingnya etika dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia adalah perlu.

### **Mengedepankan Etika Politik Dalam Perpolitikan**

Pada dasarnya persetujuan politik antara Prabowo dan Megawati lebih didasarkan karena kurangnya penerapan etika politik yang seharusnya dijalankan oleh kubu PDIP yang dimotori Megawati Soekarnoputri. Padahal etika politik merupakan pencerminan sikap pemimpin yang baik dan bertanggungjawab karena kemampuannya untuk bersikap sesuai dengan perkataan yang telah dilontarkan.

Sebagaimana ungkapan Bung Karno mengatakan "satukan kata dengan perbuatan."<sup>1</sup> Ungkapan Bung Karno ini harusnya ditiru elite PDIP, tetapi ternyata justru elite-elitenya tidak mampu menjaga ruh ajaran Bung Karno itu sendiri.

Apa itu etika politik?<sup>2</sup> Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan

---

<sup>1</sup> Lihat: Garda Maeswara, *Opera van Century: kunci rahasia di balik skandal Bank Century*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), hlm: 20.

<sup>2</sup> Etika Politik terdiri dari dua kata yaitu Etika dan Politik. **Etika** (Yunani Kuno: "*ethikos*", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi 154 – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

moral.<sup>2</sup> Sedang pengertian politik berasal dari kosa kata 'Politiés' yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara. Yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuannya. Pengambilan keputusan atau *Decisionmaking* mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.

Untuk melaksanakan tujuan tadi perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum atau *public policies*, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau *distributions* dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diperlukan suatu kekuasaan (*Power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai, baik untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat Persuasi, dan jika perlu dilakukan pemaksaan (*Coercion*). Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka (*Statement of intent*) yang tidak akan pernah terwujud.<sup>2</sup>

2

---

studi mengenai standar dan penilaian moral. Sedangkan Politik adalah proses pembagian kekuasaan yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan/atau masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Jadi etika politik adalah nilai-nilai azas moral yang disepakati bersama baik pemerintah dan/atau masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama. (Lihat: <http://id.wikipedia.org/wiki/Etika>).

<sup>2</sup> Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip dalam berbagai aspek kehidupan manusia sedangkan etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. [Lihat: Franz Magnis-Suseno, *Etika dasar: masalah-masalah pokok filsafat moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm: 15].

<sup>2</sup> Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang (*privat goals*). Selain itu politik kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perseorangan. Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian (*allocation*). [Lihat: Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmi Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h.8-9].

Secara substantif, etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subyek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara. Etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia.

Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang kearah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.<sup>2</sup>

3

Adapun “Etika Politik” harus dipahami dalam konteks “etika dan moral secara umum.” Setidaknya “etika dan moral” terdiri dari tiga hal, yaitu: pertama, etika dan moral Individual yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika individual adalah prinsip integrasi pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral. Kedua, etika moral sosial yang mengacu pada kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Tentu saja sebagaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai makhluk individual dan sosial. Ketiga, etika Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan hubungan antara manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas.<sup>2</sup> Dalam ketiga hal ini, perilaku elit politik kerap meninggalkan ketiganya atas dasar pencapaian tujuan kekuasaan (*power*), selain tujuan lain yang menjadi ambisi individual, kelompok, ataupun golongan.

---

<sup>2</sup> Lihat: Franz Magnis-Suseno, *Etika dasar: masalah-masalah pokok filsafat moral*, hlm: 15.

<sup>2</sup> M. Sofyan Lubis, Etika dan Moral Politik vs Penegakan<sup>4</sup> Hukum, <http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Etika-dan-Moral-Politik-vs-Penegakan-Hukum>

### **Tak Ada Teman Abadi Dalam Perpolitikan**

Sebuah adagium populer mengatakan “tiada musuh atau teman yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan.”<sup>2</sup> Adagium ini cocok untuk dilekatkan pada perseteruan politik antar kubu Prabowo dan kubu Jokowi yang notabene kepanjangan tangan Megawati. Keberatan Partai Gerindra atas majunya Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) dari PDIP seolah menguji keampuhan adagium tersebut.

Kesepakatan Batutulis yang menurut versi Gerindra dilanggar oleh PDIP memang menarik untuk diuji dalam kaca mata etika politik. Hal ini menyangkut seberapa kuat kontrak politik yang dibuat oleh elite politik dari kedua kubu.

Argumen versi PDIP bahwa kontrak politik itu berakhir setelah gagalnya duet Megawati-Prabowo dalam pemilihan presiden 2009 juga ada benarnya. Dengan demikian, tidak ada keharusan PDIP untuk mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2014. Begitu pula Jokowi yang maju menjadi capres sebagai sikap menjalankan mandat politik dari PDIP juga tidak dapat dianggap menentang etika politik seharusnya. Namun, apabila tidak maju di 2014 dengan pertimbangan mengedepankan amanah dan sumpah jabatan gubernur untuk memperbaiki Jakarta, akan terlihat lebih baik dan etis. Bila pun ini dilakukan, Jokowi dapat maju menjadi capres pada tahun 2019 dengan tanpa beban tanggungjawab dan amanah, selain tidak menyakiti Prabowo yang menjadi rival politik PDIP.

Sebagai seorang kader partai yang baik, Jokowi tentu saja tidak bisa disalahkan. Ia harus mematuhi perintah dari petinggi partai. Tak bijak juga rasanya ketika banyak pihak menyerang Jokowi dan mengatakan ia ingkar janji, belum tuntas memimpin Jakarta, tapi malah mengincar kursi presiden. Terlalu dini juga kalau Jokowi dicap tidak amanah mengemban tugas sebagai gubernur.

Dalam hal etika politik sebenarnya Jokowi sudah menerapkannya dengan tidak mundur dari jabatan Gubernur DKI sebagaimana diatur dalam UU Pilpres. Ia hanya mengajukan cuti panjang. Harapannya, bila tidak terpilih, ia bisa kembali menjalankan amanah memimpin Jakarta. Tidak ada janji politik yang dicerai. Walaupun sikap ini pun bukannya tanpa dilema politik, karena Jokowi akhirnya tetap dianggap tidak serius mencalonkan diri menjadi presiden, karena enggan melepaskan jabatan gubernur.

---

<sup>2</sup> Lihat: Abdul Munir Mulkhan, *Politik santri: cara menang merebut hati rakyat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm: 242.

Walaupun memang, semua pihak sudah memaklumi bahwa politik adalah urusan siapa mendapatkan kekuasaan, kapan waktunya, dan bagaimana caranya. Ketika sudah berbicara tentang kapan dan bagaimana caranya, di sini masalah etika politik terkadang selalu lupa untuk tetap perlu dipertimbangkan.

Jokowi dalam etika politik tinggal memilih, apakah lebih memikirkan etika atau mengedepankan kepentingan kekuasaan. Bukankah selama ini tidak pernah ada terlihat elite politik yang sukarela melepaskan jabatan yang sedang disandanginya demi ambisi mengejar kekuasaan lainnya. Barangkali hanya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mundur dari jabatan Bupati Belitung Timur karena bertarung dalam pemilihan Gubernur Babel pada 2007, meskipun kalah.<sup>2</sup>

Jiwa besar diperlukan oleh seorang pemimpin untuk dapat mengedepankan etika alih-alih kepentingan politik sesaat, terlebih lagi memenuhi janji politik yang dibuat. Yang dapat diharapkan semoga keputusan Jokowi nyapres adalah hal mulia, dan sejalan dengan perkataan Aristoteles bahwa tujuan asli pemerintahan adalah menciptakan kehidupan yang makmur dan bahagia.

### **Implikasi Ketatanegaraan Perseteruan KMP versus KIH**

Dampak akhir dari perseteruan politik ini mengakibatkan munculnya dua kubu besar dalam percaturan politik negara Indonesia, yaitu Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, PPP, dan PBB sebagai pendukung Prabowo-Hatta dan Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari partai PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI sebagai pendukung Jokowi-JK.

Perseteruan ini menimbulkan konflik yang tak berkesudahan, terlebih ternyata pasca sengketa pemilu presiden, Mahkamah Konstitusi menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang, yang tentunya menandakan kemenangan telak kubu Koalisi Indonesia Hebat atas kubu Koalisi Merah Putih.

Implikasi Ketatanegaraan sebagai bentuk gonjang-ganjing perseteruan dua kubu ini berupa timbulnya bentuk dan sistem baru dalam hal mekanisme pemilihan Kepala Daerah, mekanisme pemilihan Pimpinan MPR dan Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR, termasuk regulasi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain itu, kondisi Parlemen menjadi terbelah dua, karena kubu KIH membentuk kepemimpinan DPR tandingan, berlawanan dengan

---

<sup>2</sup> Lihat: <http://pemilu.tempo.co/read/analisa/7/Tiada-Teman-Abadi-dalam-Politik>

kubu KMP yang notabene menguasai kepemimpinan parlemen, baik di DPR maupun MPR. Dampak krusial dari konflik ini tentunya menimbulkan kebuntuan pelaksanaan fungsi DPR dan penyelenggaraan pemerintah.

### **Penutup**

Ada beberapa manfaat etika politik bagi para pejabat. Pertama, etika diperlukan dalam hubungannya dengan relasi antara politik dan kekuasaan. Kedua, etika politik bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pengambilan kebijakan para pejabat agar tidak menyalahi etika. Ketiga, para pejabat dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang dibuatnya, baik selama ia menduduki posisi tertentu maupun setelah meninggalkan jabatannya.

Akibat dari keterpurukan etika yang sudah menyatu dengan pentas perpolitikan, mengakibatkan masyarakat menilai politik itu kotor, politik itu memanipulasi kekuasaan, politik itu rekayasa kebaikan, politik itu praktek pembodohan. Anggapan seperti ini sering keluar dari mulut masyarakat yang sudah muak melihat atmosfir politik.

Etika politik bagi para pejabat mesti menghasilkan makna moral dari tugasnya dalam memegang jabatan publik tertentu, dan mesti dapat merubah cara berpikir dan bertindak para pejabat. Karena setiap manusia memiliki hati nurani yang menjadi penyaring sebelum melakukan tindakan. Naluri inilah yang menjadi pengontrol untuk melakukan perbuatan yang baik dalam bertindak.

Persoalan etika merupakan hal yang sangat vital dalam interaksi sosial karena setiap perbuatan manusia menimbulkan dampak sesuai dengan apa yang dilakukan. Perbuatan yang baik menghasilkan dampak yang baik, begitupun sebaliknya. Meskipun dalam kenyataan di lapangan, khususnya ranah politik, terkadang perbuatan yang baik berdampak buruk dan perbuatan yang buruk berdampak baik. Hal ini terjadi karena pemahaman 'menghalalkan segala cara' masih menghiasi pentas perpolitikan di Indonesia. Dinamika politik kebangsaan baik politik lokal maupun politik nasional hampir melupakan nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara hukum, negara religius, dan negara yang memiliki keanekaragaman adat dan budaya.

### **Pustaka Acuan**

Abdul Munir Mul Khan, Politik santri: cara menang merebut hati rakyat, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

## Nur Rohim Yunus

- Binus Media & Publishing, Corporate Communication–Bina Nusantara.  
www.binus.ac.id/www.binus.edu].
- Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmi Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Floriberta Aning S, *100 tokoh yang mengubah Indonesia: biografi singkat seratus tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia di abad 20*, Yogyakarta: Narasi, 2007.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika dasar: masalah-masalah pokok filsafat moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Garda Maeswara, *Opera van Century: kunci rahasia di balik skandal Bank Century*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2010.
- Hasrullah, Megawati dalam tangkapan pers, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- M Alfian Alfian, "Dari Perbendaharaan Etika Politik", The Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 8 Juli 2008.
- Upi Tuti Sundari Azmi, *Cinta, ambisi, politisi, dan negarawan: percakapan Upi dan La Rose*, Jakarta: Yayasan La Rose, 1999.
- Website:  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Etika>).  
<http://pemilu.tempo.co/read/analisa/7/Tiada-Teman-Abadi-dalam-Politik>  
<http://politik.kompasiana.com/2014/03/17/prabowo-keliru-mengartikan-perjanjian-batutulis-639885.html>  
<http://thegreenblog.net/2014/03/28/kriteria-capres-2014-menurut-bj-habibie-usia-harus-berada-diantara-40-60-tahun/>.  
<http://www.antaraneews.com/berita/424334/prabowo-jokowi-capres-pdip-langgar-perjanjian-batu-tulis>  
<http://www.antaraneews.com/berita/424334/prabowo-jokowi-capres-pdip-langgar-perjanjian-batu-tulis>  
<http://www.antaraneews.com/berita/424334/prabowo-jokowi-capres-pdip-langgar-perjanjian-batu-tulis>  
<http://www.bisnis.com/survei-capres-2014-jokowi-lagi-lagi-teratas>.
- M. Sofyan Lubis, Etika dan Moral Politik vs Penegakan Hukum,  
<http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Etika-dan-Moral-Politik-vs-Penegakan-Hukum>
- Yusa Djuyandi, Polemik Pencalonan Jokowi,  
<http://suar.okezone.com/read/2014/04/14/58/970057/polemi-k-pencalonan-jokowi>].